

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

**Badan perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan daerah**





Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa baratu

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhana WaTa'ala, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan. Adapun dokumen Renstra berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026.

Renstra Bappelitbangda Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan dengan beberapa tuntutan substansi yaitu Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Bappelitbangda berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan, serta Penutup.

Dalam kurun waktu tiga tahun yang akan datang agar seluruh pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mempedomani Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 dalam menjalankan tugas.

Diucapkan terima kasih kepada pihak yang turut serta dalam membantu penyusunan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026. Kemudian, dengan memohon Rahmat Allah Subhana WaTa'ala, semoga Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengawal dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 demi kesejahteraan warga dan kesuksesan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Makassar,

2023

Kepala Badan,

Dr. Setiawan Aswad, MDevPlg

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730825 199203 1 002

PARAF:

SEKRETARIAT

:

KEPALA BIDANG

:

KA. SUB. BIDANG, SUB. BAG

:

KONSEPTOR

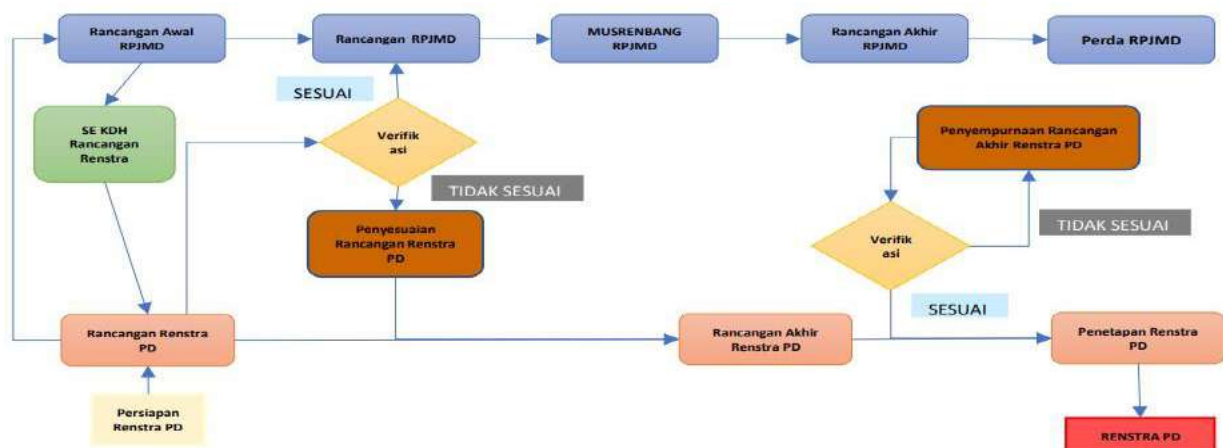
:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda tahun 2024 – 2026 disusun sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 dan atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Tahapan awal penyusunan Renstra Bappelitbangda adalah penyusunan Pohon Kinerja, dimana pohon kinerja tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 89 Tahun 2021, adapun pedoman penyusunan Renstra mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

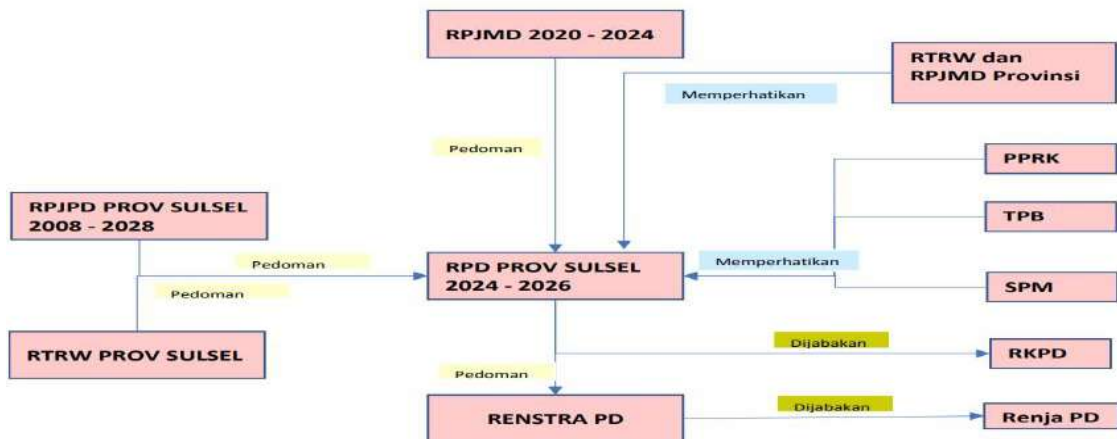
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan



Renstra Bappelitbangda Sulawesi Selatan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Renstra disusun sebagai

acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 sebagai salah satu bagian komponen perencanaan. Adapun keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatukan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan, dengan demikian Bappelitbangda mengawal kebijakan-kebijakan yang terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta penelitian dan pengembangan untuk Sulawesi Selatan yang lebih baik.

1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Pedoman Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kedua dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1);



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 51);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Bappelitbangda Tahun 2024 – 2026 disusun dengan **maksud** untuk menjabarkan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 dengan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai petunjuk untuk memudahkan seluruh jajaran Pegawai Bappelitbangda untuk memahami arah dan kebijakan guna pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024 – 2026 adalah :

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda untuk Tahun 2024 - 2026;
- b. Sebagai alat dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Memudahkan seluruh unit Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappelitbangda
- d. Sebagai pedoman Evaluasi Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2026.

1.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. **BAB I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
2. **BAB II. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
3. **BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 - 2026, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan, serta penentuan isu-isu strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
4. **BAB IV. Tujuan dan Sasaran** berisi dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
5. **BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, mengemukakan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
6. **BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
7. **BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
8. **BAB VIII. Penutup**, berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024 - 2026.



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam keterkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan dalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, sumberdaya yang dimiliki oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi yang diantaranya adalah kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan dalam pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka nomenklatur sub bidang pada Bappelitbangda berubah menjadi subkoordinator. Adapun susunan organisasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Kepala Badan mempunyai **tugas** membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. **Kepala Badan Perencanaan**



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai **fungsi**:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh 3 subbagian yaitu :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Umum;
- c. Subbagian Keuangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai **tugas** membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan,

dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah. Adapun bidang ini mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai **tugas** membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Adapun bidang ini mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai **tugas** membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam. Adapun bidang ini mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai **tugas** membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun bidang ini mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai **tugas** membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Adapun bidang ini mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1.2. SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian target kinerja Bappelitbangda. Agar dapat terciptanya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai kebutuhan.

Berdasarkan data Kepegawaian sampai jumlah Sumber daya manusia Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan **30 April 2023** adalah sebanyak 180 orang sebagaimana yang disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Gambaran Umum Kepegawaian Bappelitbangda menurut jabatan:

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	10
2.	Fungsional Perencana	42
3.	Fungsional Peneliti	8
4.	Fungsional Analisis Kebijakan	3
5.	Fungsional Analisis Kepegawaian	1
6.	Fungsional Perakayasa	2
8.	Fungsional Pustakawan	2
9.	Fungsional Arsiparis	7
10.	Pelaksana	105
Jumlah		180

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2023

Dari jumlah 180 ASN, dibantu oleh 74 pegawai tidak tetap, dimana Sekretariat sebanyak 32 orang, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah sebanyak 7 orang, Bidang Infratraktur dan Kewilayahan sebanyak 8 orang, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 8 orang,

Bidang Ekonomi dan SDA sebanyak 4 orang. Sehingga total pegawai di Bappelitbangda jika digabung dengan Pegawai Tidak Tetap menjadi 258 orang pegawai.

Tabel 2.2 Gambaran Umum Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin sebagai berikut:

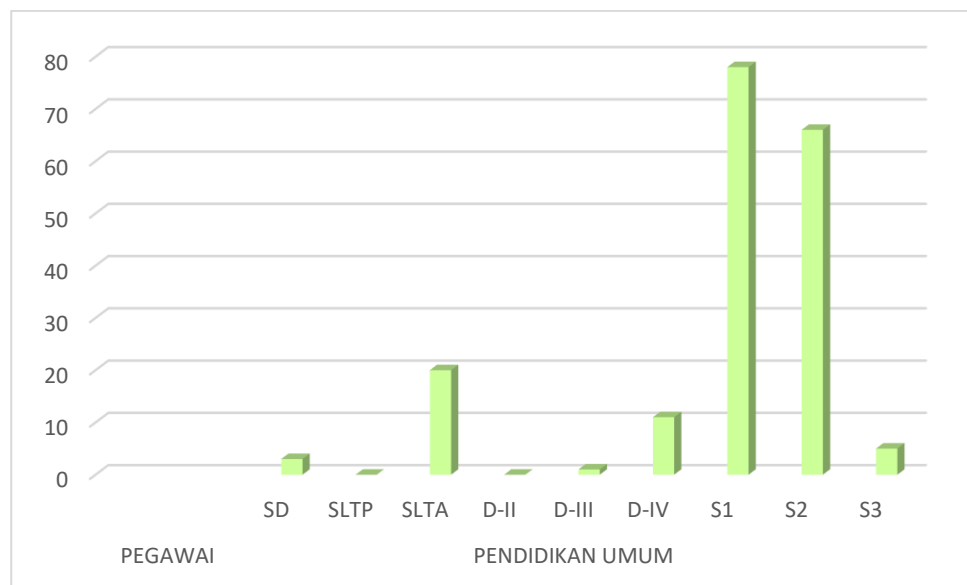
GOLONGAN PEGAWAI		JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
Golongan IV	IV/e		1	1
	IV/d	1	0	1
	IV/c	4	9	13
	IV/b	9	12	21
	IV/a	11	15	26
Sub Total		25	37	62
Golongan III	III/d	20	13	33
	III/c	8	13	21
	III/b	13	9	22
	III/a	14	8	22
Sub Total		55	43	98
Golongan II	II/d	8	4	12
	II/c	4	1	5
	II/b	0	0	0
	II/a	0	0	0
Sub Total		12	5	17
Golongan I	I/d	1		1
	I/c	2		2
	I/b	0		0
	I/a			0
Sub Total		3	0	3
Total		95	85	180

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv. Sulsel 2023

Distribusi pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menurut golongan, menunjukkan Sebagian besar pegawai adalah golongan III adalah sebesar 54%, golongan IV adalah sebesar 34%, golongan II adalah sebesar 9% dan golongan I adalah sebesar 2%, dengan mayoritas pegawai yaitu laki-laki sebesar 53% dan perempuan 47%.

Adapun data ini menunjukkan bahwasanya 87% pegawai berada pada golongan III dan golongan IV sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Dengan demikian potensi ini perlu dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karir pegawai agar potensi yang dimiliki oleh pegawai dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Tabel 2.3 Gambaran Umum Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Pendidikan sebagai berikut:



Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2023

Distribusi pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menurut Pendidikan menunjukkan besar pegawai dengan jenjang Pendidikan SD sebanyak 3 pegawai, SLTA sebanyak 19 pegawai, DIII sebanyak 1 orang, DIV sebanyak 11 pegawai, S1 sebanyak 74 pegawai, S2 sebanyak 67 pegawai dan S3 sebanyak 5 pegawai. Dengan melihat kondisi Pendidikan mayoritas pegawai, maka dapat dilihat bahwasanya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dimana dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, kompetensi ini dibutuhkan, utamanya dalam menggunakan data dan informasi, menemukan pokok-pokok permasalahan, menelaah dan membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tabel 2.4 Gambaran Umum Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Pendidikan sebagai berikut:

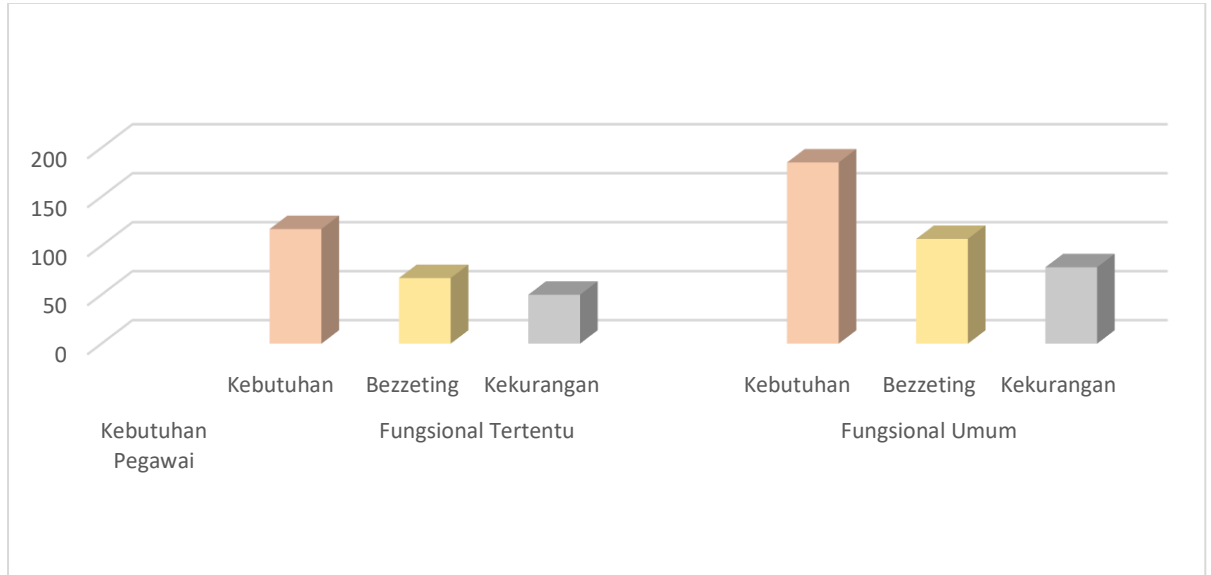
NO	UNIT WILAYAH	USIA							JUMLAH
		20 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	> 50	
1	Sekretariat		7	3	7	7	9	14	47
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3		2	1	4	12	22
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2		5	3	8	9	27
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		3	1	3	3	6	7	23
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			2	1	5	6	10	24
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan		3	2	9	4	7	12	37
JUMLAH		0	18	8	27	23	40	64	180

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2023

Tingkat usia sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas instansi sebab terkait dengan kemampuan fisik seorang pegawai. Pegawai yang berada pada usia produktif cenderung lebih kuat dari segi fisik disbanding pekerja usia non produktif.

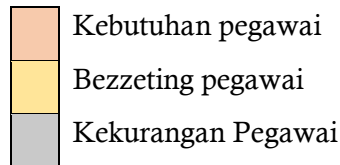
Adapun Distribusi pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menurut usia, menunjukkan Sebagian besar pegawai adalah usia 50 keatas sebesar 36%, rentang usia sebesar 46-50 sebesar 22%, rentang 41-45 sebesar 13%, rentang usia 36-40 sebesar 15%, rentang usia 31-35 sebesar 4 % dan rentang usia 26-30 sebesar 18%.

**Tabel 2.5 Gambaran Umum Grafik Kebutuhan Pegawai Bappelitbangda
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:**



Keterangan

diagram :



Berdasarkan Analisis Jabatan, jumlah kebutuhan pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 117 fungsional tertentu dan 185 fungsional umum. Kondisi sampai dengan 30 April 2023 baru terisi sebanyak 65 fungsional tertentu dan 105 fungsional umum. Adapun saat ini, terdapat 3 fungsional umum yang mengikuti ujian perpindahan kedalam jabatan fungsional dan saat ini masih menunggu pelantikan. Dengan demikian, diperkirakan ada penambahan pada fungsional tertentu dan pengurangan pada fungsional umum.

Adapun dengan adanya kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Untuk mentaktisi hal tersebut dan sementara menunggu penambahan pegawai, pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda dibantu oleh tenaga non ASN yang berjumlah 74 orang.

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, pokok dan fungsinya serta pencapaian target kinerja Bappelitbangda.

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Adapun secara lebih rinci dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.6 Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 30 April 2023 sebagai berikut:

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	3	1	TANAH	1	534,597,040.00	
			a. Tanah	1	534,597,040.00	
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN	2780	21,707,888,363.00	
			a. Alat Besar			
			b. Alat Angkutan	60	5,119,928,200.00	
			c. Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3	32,970,000.00	
			d. Alat Pertanian	1	450,000.00	
			e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1670	7,297,257,714.00	
			f. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	141	960,154,600.00	
			g. Alat Kedokteran Dan Kesehatan			
			h. Alat Laboratorium	185	901,679,733.00	
			i. Alat Persenjataan			
			j. Komputer	719	7,374,208,116.00	
			k. Alat Eksplorasi			
			l. Alat Pengeboran			
			m. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian			
			n. Alat Bantu Eksplorasi			
			o. Alat Keselamatan Kerja			
			p. Alat Peraga			
			q. Peralatan Proses/Produksi			
			r. Rambu - Rambu	1	21,240,000.00	
			s. Peralatan Olah Raga			
1	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	24	11,105,827,200.00	
			a. Bangunan Gedung	23	10,906,627,200.00	
			b. Monumen			
			c. Bangunan Menara			
			d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	199,200,000.00	
1	3	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	8	943,859,700.00	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
			a. Jalan Dan Jembatan			
			b. Bangunan Air	2	29,600,000.00	
			c. Instalasi	4	489,252,700.00	
			d. Jaringan	2	425,007,000.00	
1	3	5	ASET TETAP LAINNYA	10	1,328,977,850.00	
			a. Bahan Perpustakaan	10	1,328,977,850.00	
			b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
			c. Hewan			
			d. Biota Perairan			
			e. Tanaman			
			f. Barang Koleksi Non Budaya			
			g. Aset Tetap Dalam Renovasi			
1	3	6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
			a. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
1	5	1	ASET LAINNYA	27	1,684,566,500.00	
			a. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
			b. Aset Tidak Berwujud	13	1,626,322,000.00	
			c. Aset Lain-Lain	14	58,244,500.00	
JUMLAH				27	1,684,566,500.00	

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2023

Tabel 2.7 Aset Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 April 2023 sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Note Book/ Laptop	160 unit	Kurang lebih 60 unit terpakai (selebihnya rusak)
2.	PC/ Komputer	195 unit	120 unit terpakai (selebihnya rusak)
3.	Printer	160 unit	Kurang lebih 100 unit yang terpakai (selebihnya rusak)
4.	Kendaraan Roda Empat	12 unit	Eselon 2 : 1 unit Eselon 3 : 6 unit Operasional : 4 unit Pinjam Pakai : 1 unit



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
5.	Kendaraan Roda dua	22 unit	Kasubag dan Sub kord : 18 unit Operasional 4 unit

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv. Sulsel 2023

Masa pakai asset seperti computer, laptop/notebook dan sejenisnya adalah lima tahun. Dengan melihat kondisi asset yang digambarkan pada table diatas, laptop/ notebook, komputer dan printer banyak yang sudah tidak layak pakai karena asset diperoleh sebelum tahun 2015. Adapun Sebagian asset yang sudah tidak dapat digunakan tersebut sudah diusulkan untuk dihapus dan sampai saat ini masih menunggu berita acara penghapusan asset oleh Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi selatan.

Kondisi asset seperti computer, laptop/ notebook dan printer saat ini jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang terdapat pada Bappelitbangda, maka **beberapa pegawai belum mendapatkan fasilitas computer, laptop/ notebook dan printer**. Oleh karena itu, setiap tahunnya Bappelitbangda mengusulkan tambahan computer, laptop/ notebook dan printer. Hal tersebut karena pengadaan diusulkan secara bertahap. Adapun untuk tahun 2023, setiap bidang mengusulkan masing-masing computer, laptop/notebook dan printer adalah sebanyak 3 barang untuk perjenis.

Adapun Rencana Dasar Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkup Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN		
		2024	2025	2026
1.	Laptop/Notebook	20 Unit	20 Unit	20 Unit
2.	Komputer PC	15 Unit	15 Unit	15 Unit
3.	Printer	25 Unit	25 Unit	25 Unit
4.	Air Conditioner (AC)	10 Unit	15 Unit	20 Unit

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv. Sulsel 2023

1.2.3. Instrumen Pendukung

Guna mendukung pencapaian target kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan instrument-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Bappelitbangda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka harus dapat dimanfaatkan dengan tepat. Hal tersebut sebagai peran dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selalu berbenah guna menangkap segala peluang yang dapat muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

a. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-Planning*)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-Planning*) pertama kali launching pada tahun 2017 yang berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. *E-Planning* digunakan untuk memastikan perencanaan disusun secara disiplin mengikuti program prioritas visi misi pembangunan daerah dengan mengimplementasikan kerangka berpikir logis yang membatasi terjadinya penyimpangan perencanaan.

Eplanning pertama kali diinisiasi dengan tujuan untuk menjaga konsistensi data perencanaan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian berintegrasi dengan penganggaran Provinsi Sulawesi Selatan. Pengembangan *eplanning* juga dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi dengan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yaitu esakip dan simonev. Selanjutnya diharapkan *eplanning* dapat dikembangkan dengan terintegrasi pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian



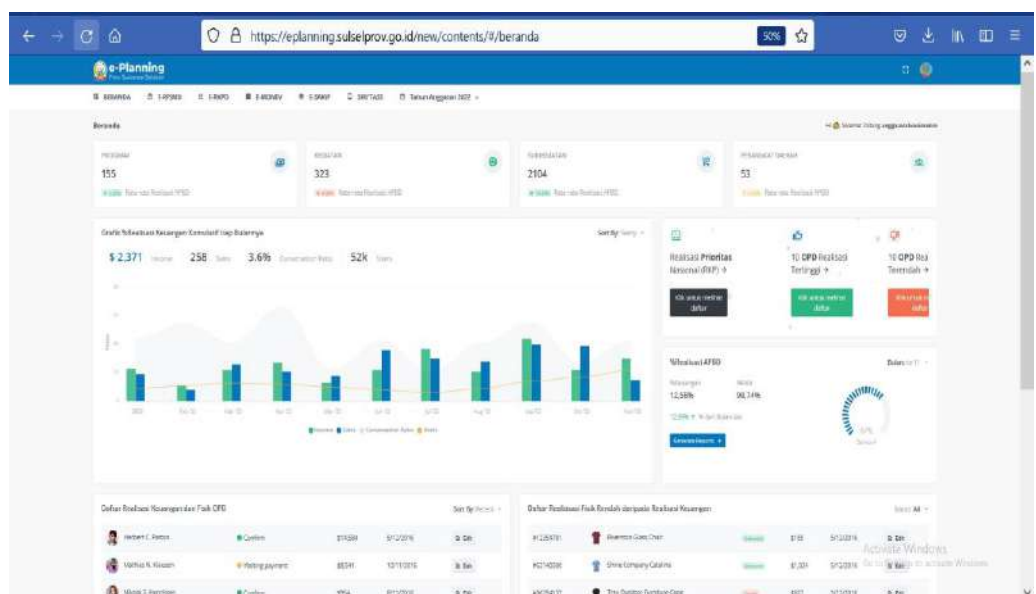
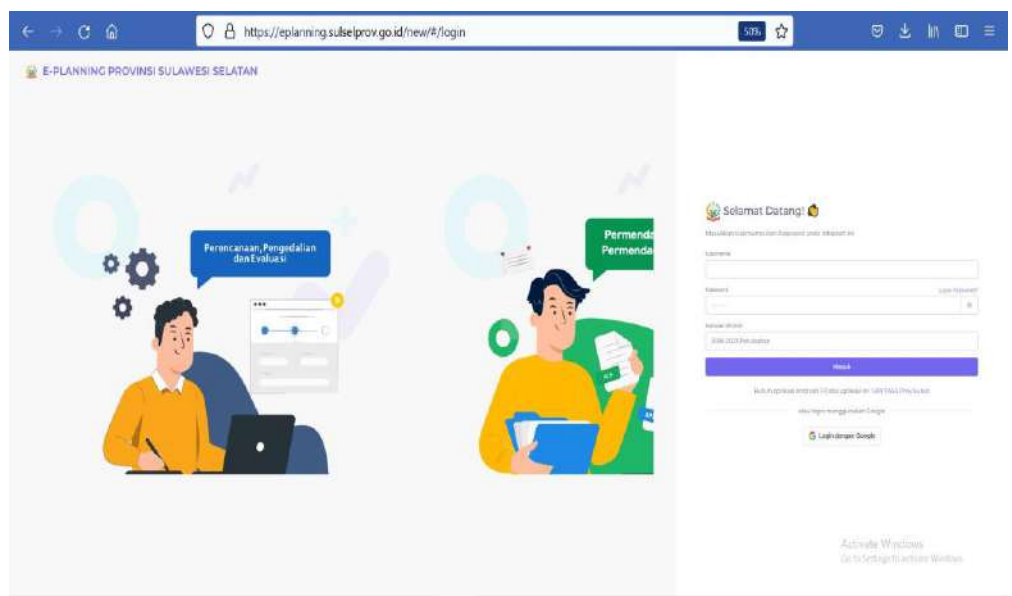
Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Dalam Negeri RI atau aplikasi (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
SIPD.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau e-planning dapat diakses pada laman <https://eplanning.sulselprov.go.id/new/#/login> dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Aplikasi e-planning



b. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV)

E-monev pertama kali dioperasikan pada tahun 2017 diluncurkan beberapa bulan setelah E-Planning. Tujuan E-monev dibangun adalah untuk mengatasi kesulitan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan aktivitas pengendalian pembangunan daerah yang memiliki resiko *human eror*, mengatasi hambatan transparansi informasi, serta mengatasi kendala dalam pengukuran kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sistem ini sebagai media untuk sinkronisasi hasil evaluasi pembangunan daerah sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan lebih baik dan menunjukkan perkembangan program strategis secara jelas dan tergambar dengan baik. E-monev juga menyajikan analisis factor penghambat dan factor pendorong pencapaian pembangunan daerah, dan dapat dijadikan sebagai pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih tepat sasaran.

E-monev telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) dan e-Sakip untuk mengurangi double entry data. Penilaian kinerja yang disajikan dalam E-monev dapat disajikan dalam bentuk capaian fisik dan capaian keuangan, serta capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

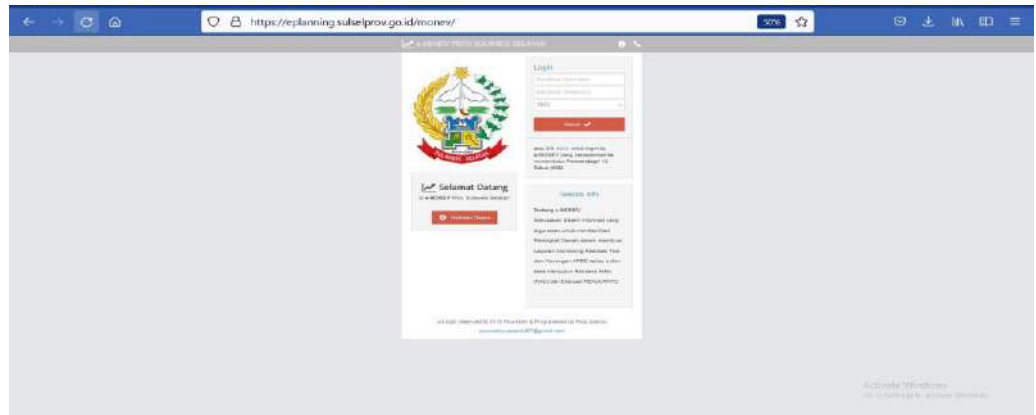
Sistem informasi monitoring dan evaluasi atau E-monev dapat diakses pada laman <https://eplanning.sulselprov.go.id/monev/> dengan tampilan sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Gambar 2.3 Aplikasi e-money



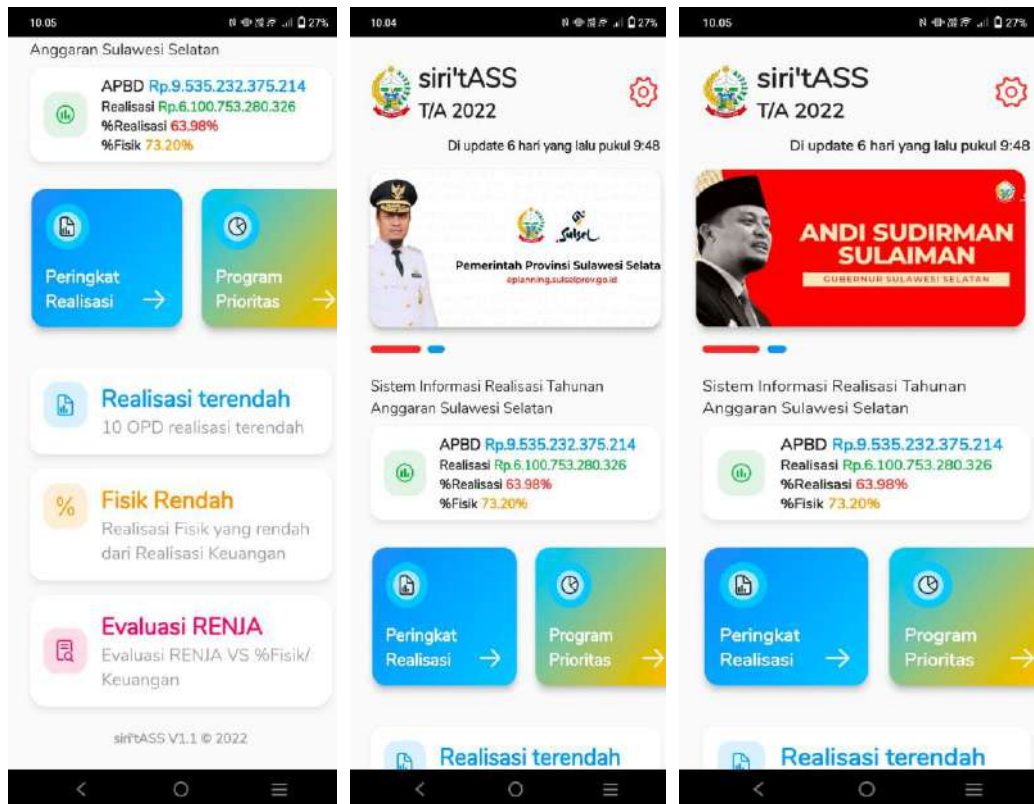
No.	Nama DPRD	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Tau Terpenuhi (Bulan ke-1)
1	DPRD Kabupaten Selayar	131.491.262.820,00	111.128.884,18,00	84,21%	100%
2	DPRD Kabupaten Gowa	10.444.044.946,00	11.104.482.044,00	106,33%	100%
3	DPRD Kabupaten Pangkep	454.441.961.760,00	361.108.472.644,00	79,46%	100%
4	DPRD Kabupaten Barru	12.021.991.095,00	81.698.830,72,00	6,79%	100%
5	DPRD Kabupaten Bantaeng	33.879.667.010,00	25.775.844.744,00	76,08%	100%
6	DPRD Kabupaten Takalar	8.774.761.582,00	7.108.872.712,00	80,91%	100%
7	DPRD Kabupaten Pinrang	2.342.546.487,00	1.687.128.554,88,00	72,06%	100%
8	DPRD Kabupaten Selayar	33.891.347.820,00	22.178.150,72,00	65,47%	100%
9	DPRD Kabupaten Gowa	30.481.344.840,00	34.128.478.044,00	111,97%	100%
10	DPRD Kabupaten Pangkep	36.231.751.880,00	32.784.425,12,00	90,48%	100%
11	DPRD Kabupaten Barru	41.861.712.418,00	21.184.861.412,00	50,63%	100%
12	DPRD Kabupaten Bantaeng	18.888.046.742,00	12.172.331.644,00	64,51%	100%
13	DPRD Kabupaten Takalar	62.871.888.080,00	32.828.336,48,00	52,21%	100%
14	DPRD Kabupaten Pinrang	62.821.000.000,00	38.822.828.248,00	61,80%	100%
15	DPRD Kabupaten Selayar	41.161.947.070,00	14.161.744,12,00	34,42%	100%

c. Siri'tass

Aplikasi ini sudah diluncurkan sejak akhir tahun 2017, dan terus mengalami pengembangan setiap tahunnya. Aplikasi ini menyajikan capaian realisasi kinerja dan anggaran Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, baik berupa capaian fisik dan keuangan serta capaian kinerja, peringkat realisasi Perangkat Daerah, program prioritas perangkat daerah dan evaluasi renja. Aplikasi siri'tass dapat digunakan di *Mobile Phone* agar informasi pembangunan dapat dibuka oleh siapapun, kapan saja dan dimana saja.

Adapun gambaran aplikasi ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4 Aplikasi *Siri'tass*



d. Website Bappelitbangda

Tujuan didirikannya Website bappelitbangda adalah sebagai media dalam rangka keterbukaan informasi publik dan juga pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam website tersebut menyajikan layanan yang diberikan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan akses masyarakat atau penerima layanan dapat memberikan survey dan pengaduan dalam pelayanan yang diberikan oleh bappelitbangda.

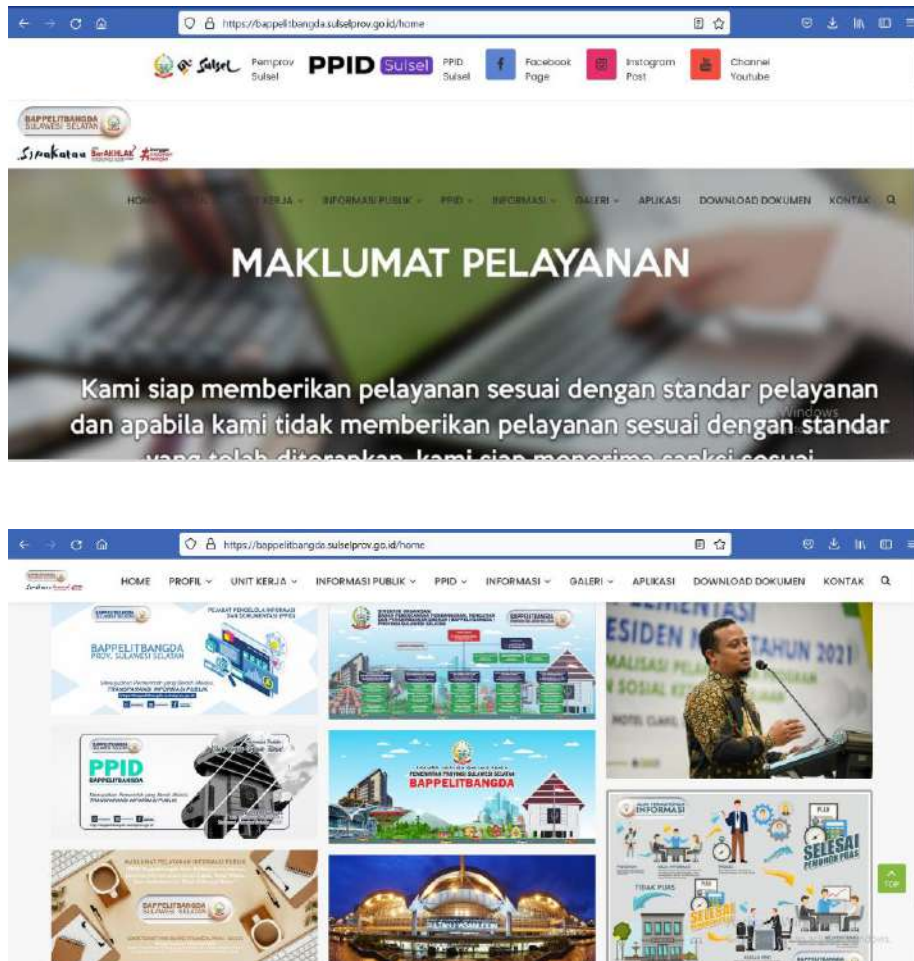
Layanan aplikasi yang disajikan oleh bappelitbangda juga terhubung dengan website bappelitbangda dan dapat diakses dalam websiter tersebut. Adapun laman website bappelitbangda adalah <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/home> dengan penyajian website sebagai berikut:



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Gambar 2.5 Website Bappelitbangda



e. Media Sosial Bappelitbangda

Dalam rangka pelayanan peningkatan keterbukaan informasi publik Bappelitbangda memanfaatkan layanan instagram, facebook dan youtube dimana masing-masing media sosial tersebut juga terhubung dengan website bappelitbangda. Media sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat komunikasi dengan masyarakat.

Terkait profil media sosial Bappelitbangda dapat dilihat sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Gambar 2.6 Media Sosial Bappelitbangda

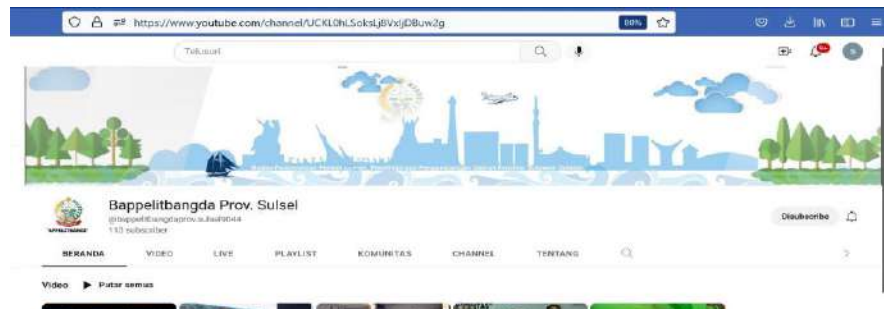
Instagram



Facebook



Youtube





Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

1.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah. Beberapa kinerja yang telah dilakukan bappelitbangda selama tahun 2018-2022 antara lain :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan;
3. Dokumen hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan);
4. Dokumen-dokumen koordinasi perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi dokumen kajian pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
5. Analisis data guna menunjang perencanaan pembangunan yang berkualitas;
6. Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
7. Hasil-hasil inovasi daerah;
8. Beberapa penghargaan dari nasional untuk provinsi Sulawesi selatan diantaranya penghargaan pembangunan daerah dari Bappenas, inovasi tatanan new normal dari Kementerian Dalam Negeri dan penghargaan terkait penelitian dan pengembangan daerah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.

Adapun gambaran kinerja Bappelitbangda selama 5 tahun tersebut tertuang dalam table T.C 23 dan T.C 24 sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

**Tabel T.C 23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)				92	94	95	96	97	94,71	99,1	146,2 2	124,0 3	-	103	101	154	129	-
2.	Nilai SAKIP OPD				80	80	80	81	83	80	80	80	81	-	100	100	100	100	-
3.	Temuan material				-	0,06	0,06	0,06	0,05	-	0,06	0,06	0,05	-	-	100	100	100	-
4.	% ASN nilai SKP kategori baik				100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
5.	Konsistensi				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program RPJMD kedalam RKPD																		
6.	Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional				100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
7.	Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat				92	92	92,5	92,5	93	1586	90	90,6	90,03	-	1724	98	98	97,65	-



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	capaian hasil (outcome) 75 %																		
8.	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD				100	100	96	-	-	100	96	100	-	-	100	96	104	-	-
9.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah				-	-	20	30	40	-	-	20	30	-	-	-	100	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2023



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Dikarenakan terjadi momentum perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 juga ikut berubah dengan menyesuaikan perubahan dan kebutuhan yang terjadi. Adapun dapat dilihat rata-rata capaian kinerja mengalami peningkatan, diantaranya adalah :

1. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan), yang mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, dimana pada Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat **226 (dua ratus dua puluh enam) Program** dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 terdapat **223 (dua ratus dua puluh tiga) Program**.
3. Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, jika melihat capaian kinerja antara 2019, 2020 dan 2021 – dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang dimana terjadi penggabungan Perangkat Daerah, sehingga mengakibatkan beberapa program yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang tergabung menjadi tidak terpakai.
4. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) 75%, jika melihat capaian kinerja antara 2019, 2020 dan 2021- dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2019 terjadi capaian kinerja yang tinggi hal tersebut dikarenakan banyaknya target kinerja prioritas pembangunan daerah yang jauh melebihi target yang ingin dicapai. Adapun capaian target ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada bidang urusan masing-masing, dimana Bappelitbangda berperan untuk mengkoordinasi dan memonitoring capaian target dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Tabel T.C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
a.	Program perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (prioritas)	Rp. 10.747.395.000	Rp. 8.779.439.223	Rp. 11.371.147.728	Rp. 11.261.969.814	Rp. 11.174.958.560	Rp. 9.429.867.096	Rp. 8.639.264.451	Rp. 10.210.502.119	Rp. 9.988.156.771	
b.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	-	Rp. 38.318.791.132	Rp. 37.426.539.754	Rp. 39.365.912.776	-	-	Rp. 37.162.659.674	Rp. 36.861.213.057	
c.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	Rp. 9.290.649.752	Rp. 5.587.721.788	Rp. 3.797.141.400	-	-	Rp. 8.296.426.021	Rp. 4.733.429.019	
d.	Program penelitian dan	-	-	Rp. 4.375.028.600	Rp. 8.602.658.540	Rp. 4.709.149.450	-	-	Rp. 4.166.289.653	Rp. 7.141.187.252	



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	pengembang an daerah										
e.	Program pengembang an pusat pertumbuha n baru (prioritas)	Rp. 689.310.00 0	Rp. 1.505.175.27 1	-	-	-	Rp. 594.852.99 3	Rp. 916.431.6 59	-	-	-
f.	Program perencanaan pemerintaha n dan pembangun an manusia	Rp. 1.315.000. 000	Rp. 970.469.705	-	-	-	Rp. 896.360.70 6	Rp. 925.007.5 97	-	-	-
g.	Program Perencanaa n perekonomi an	Rp. 849.790.00 0	Rp. 2.271.236.11 2	-	-	-	Rp. 780.707.95 8	Rp. 2.124.084 .112	-	-	-
h.	Program perencanaan sumber daya alam	Rp. 282.960.60 0	Rp. 349.649. 729	-	-	-	Rp. 249.245.10 0	Rp. 229.762.1 30	-	-	-
i.	Program perencanaan infrastruktur dan	Rp.4.746.2 40.000	Rp. 5.562.650.00 0	-	-	-	Rp. 4.513.314. 200	Rp. 5.432.912 .800	-	-	-



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kewilayahan										
j.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 4.040.386.500	Rp. 7.918.673.908	-	-	-	Rp. 3.518.616.602	Rp. 7.591.636.123	-	-	-
k.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 3.348.308.420	Rp. 3.329.913.700	-	-	-	Rp. 3.170.734.480	Rp. 2.850.925.152	-	-	-
l.	Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Rp. 1.146.985.480	Rp. 931.702.000	-	-	-	Rp. 969.314.943	Rp. 885.307.339	-	-	-
m.	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 99.700.000	Rp. 356.226.000	-	-	-	Rp. 77.824.000	Rp. 183.492.900	-	-	-
n.	Program pengembangan dan	-	Rp. 871.730.142	-	-	-	-	Rp. 633.621.211	-	-	-



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	implementasi inovasi pemerintahan (prioritas)										
o.	Program kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	-	Rp. 2.894.818.300	-	-	-	-	Rp. 2.016.532.965	-	-	-
2.	Belanja tidak langsung	Rp. 21.043.512.774	Rp. 31.549.864.363	-	-	-	Rp. 21.002.585.878	Rp. 29.990.310.634	-	-	-

Lanjutan table T.C 24

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
2019	2020	2021	2022	2023
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
91,8	92,05	94,4	93,4	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2022



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Sebagaimana halnya terjadi perubahan kinerja, maka perubahan pada nama program sepanjang tahun 2019-2023 pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan juga terjadi. Hal ini disebabkan terjadi penggabungan Perangkat Daerah yang awalnya 2 (dua) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) menjadi 1 (satu), selain itu dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah turunannya mengalami perubahan 2 (dua) kali hingga yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inteventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat realisasi paling rendah di Tahun 2019 pada Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 68,2%, disebabkan terjadinya efisiensi belanja terutamanya pada rekening belanja perjalanan dinas sehingga realisasi anggaran tidak dapat terserap dengan maksimal.



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

1.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tantangan dan peluang Bappelitbagda Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

<i>Kekuatan (Strengths)</i>	<i>Kelemahan (weakness)</i>
a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; b. Secara kuantitas SDM Bappelitbangda sudah memadai c. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan d. Terdapat dukungan TIK yang modern	a. Manajemen kinerja masih belum tepat b. Belum optimalnya pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja c. Koordinasi antar unit kerja masih lemah d. SIRITA'SS hanya menampilkan realisasi fisik dan keuangan sehingga data capaian kinerja tidak terpantau secara real time e. Masih kurangnya pemanfaatan penelitian sebagai referensi dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)	Ancaman/ Tantangan (Threats)
Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun pembangunan daerah	Dinamika perubahan kebijakan nasional yang tinggi, sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan evaluasi;
	Terdapat beberapa indikator kinerja yang kebijakan pelaksanaan evaluasi lebih lambat dibanding kebijakan pelaksanaan laporan evaluasi kinerja
	Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah

Peluang (Opportunities)	Ancaman/ Tantangan (Threats)
Terdapat dukungan TIK yang modern	Terdapatnya system aplikasi perencanaan yang belum maksimal sehingga untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus dikawal lebih ekstra
Terdapat banyak Pendidikan dan pelatihan dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Lembaga eksternal	Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai (penempatan kasubag program di PD belum sepenuhnya memahami Peraturan terkait Perencanaan
	Dukungan data dan informasi dari Perangkat Daerah yang masih kurang guna penyusunan dokumen perencanaan

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi, dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Untuk Internal, Bappelitbangda menyusun Pohon Kinerja sebagai alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan Outcome yang diinginkan.
2. Untuk Internal, Bappelitbangda melakukan Cascading Kinerja untuk memastikan kontribusi Tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di Bappelitbangda terhadap pencapaian sasaran RPJMD;
3. Untuk Eksternal, Melakukan penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui penyusunan Pohon Kinerja dengan menentukan hal-hal apa saja yang dicapai berdasarkan tupoksi, isu strategis/permasalahan yang dihadapi atau akan dihadapi di Sulawesi Selatan, serta ekspektasi/ harapan masyarakat dan/atau stakeholder. Kemudian dilanjutkan dengan Cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Berupaya mempertahankan kinerja yang telah baik secara berkelanjutan;

5. Melakukan koordinasi di lingkungan internal dan eksternal (Perangkat Daerah, Stakeholders dll) secara intensif dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan koordinasi penyediaan data pembangunan baik dari pusat, Perangkat Daerah dan Kab/Kota secara efektif dan efisien;
7. Melakukan penggabungan satu data pembangunan kepada semua perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Meningkatkan pemanfaatan dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

Adapun tantangan dan peluang berdasarkan kelompok layanan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Telaah Renstra K/L

Kementerian PPN/ Bappenas memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, yang berperan sebagai penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang seperti koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan lain lain.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/ Bappenas, tantangan yang dihadapi dalam merencanakan pembangunan nasional tahun 2020-2024, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya ketidakpastian global seperti perkembangan geopolitik, perlambatan ekonomi, ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam. Ketidakpastian tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi nasional dan daerah;
- b. Revolusi industry 4.0 dan ekonomi digital;
- c. Defisit transaksi berjalan yang meningkat, disebabkan oleh ekspor yang didominasi oleh ekspor komoditas dengan nilai yang relative rendah;
- d. Laju pertumbuhan ekonomi yang relative stagnan;
- e. Pandemi Covid-19;



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

f. Mitigasi bencana alam dan non alam.

Beberapa tantangan perencanaan pembangunan nasional tersebut dapat menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian Bappelitbangda dalam merencanakan pembangunan daerah, karena dalam perencanaan pembangunan nasional bermuara pada perencanaan pembangunan daerah. Dinamika perubahan lingkungan terjadi dengan cepat dan tidak dapat terprediksi, dengan demikian perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat merespon terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Perencanaan pembangunan yang dapat berorientasi hasil dan berdampak nyata bagi masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mampu mengubah kearah yang diharapkan. adalah salah satu tantangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Agar hal tersebut dapat terwujud, sinergi pembangunan lintas sektor, dimana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai koordinator dalam pembangunan di Sulawesi selatan, dan memastikan program tersampaikan dengan baik. Bappelitbangda berwenang menentukan prioritas pembangunan daerah dan persetujuan terhadap usulan program dan pagu indikatif program daerah. Selain itu, dalam pengendalian perencanaan, bappelitbangda melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembangunan utamanya program prioritas serta menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan dan rekomendasi untuk pelaksanaan pembangunan di tahun selanjutnya.

1.4.2. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Telaah Renstra Kab/ Kota

Berdasarkan telaah renstra Kabupaten/Kota, tantangan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah masih terbatasnya data dan informasi penunjang perencanaan, belum optimalnya kompetensi SDM Perencanaan, seringnya perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah, belum optimalnya sinergi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, masih terbatasnya kesempatan untuk mengaplikasikan hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi.



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Adapun berdasarkan telaah renstra Kab/ Kota, beberapa peluang pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/ Kota, proses perencanaan dewasa ini telah didukung oleh teknologi informasi, bimbingan teknis dan diklat-diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM perencanaan, adanya kompetisi inovasi pelayanan public di tingkat pusat dan daerah.

1.4.3. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Dalam memberikan layanan kepada Organisasi Perangkat Daerah, terdapat beberapa peluang diantaranya adalah :

1. Dengan adanya Eplanning dan Simonev, Bappelitbangda dapat memantau program, kegiatan, subkegiatan dan target-target yang akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
2. Dengan Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun Pohon Akar Masalah, *Critical Succes Factor* dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah, maka Perencanaan Daerah sudah sesuai dengan kondisi dan target yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait perencanaan dengan pemateri baik dari Kementerian ataupun dari Bappelitbangda.

Adapun tantangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengintegrasian antara Sistem perencanaan dan penganggaran dari Pemerintah Pusat dengan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat diintegrasikan dengan maksimal sehingga kemungkinan eror masih dapat terjadi;
2. Dinamika perubahan SDM (Kasubag Program) yang tinggi, sehingga membuat proses pembelajaran perencanaan, evaluasi dan pelaporan tidak maksimal;



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

3. Informasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah tidak lengkap atau terkadang terlambat dari batas waktu evaluasi, sehingga analisis dalam evaluasi capaian kinerja kurang maksimal.



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan yang berperan sebagai koordinator dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Perencanaan yang disusun diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan sehingga target pembangunan Daerah dapat tercapai.

Adapun identifikasi masalah berdasarkan bidang-bidang yang terdapat di Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

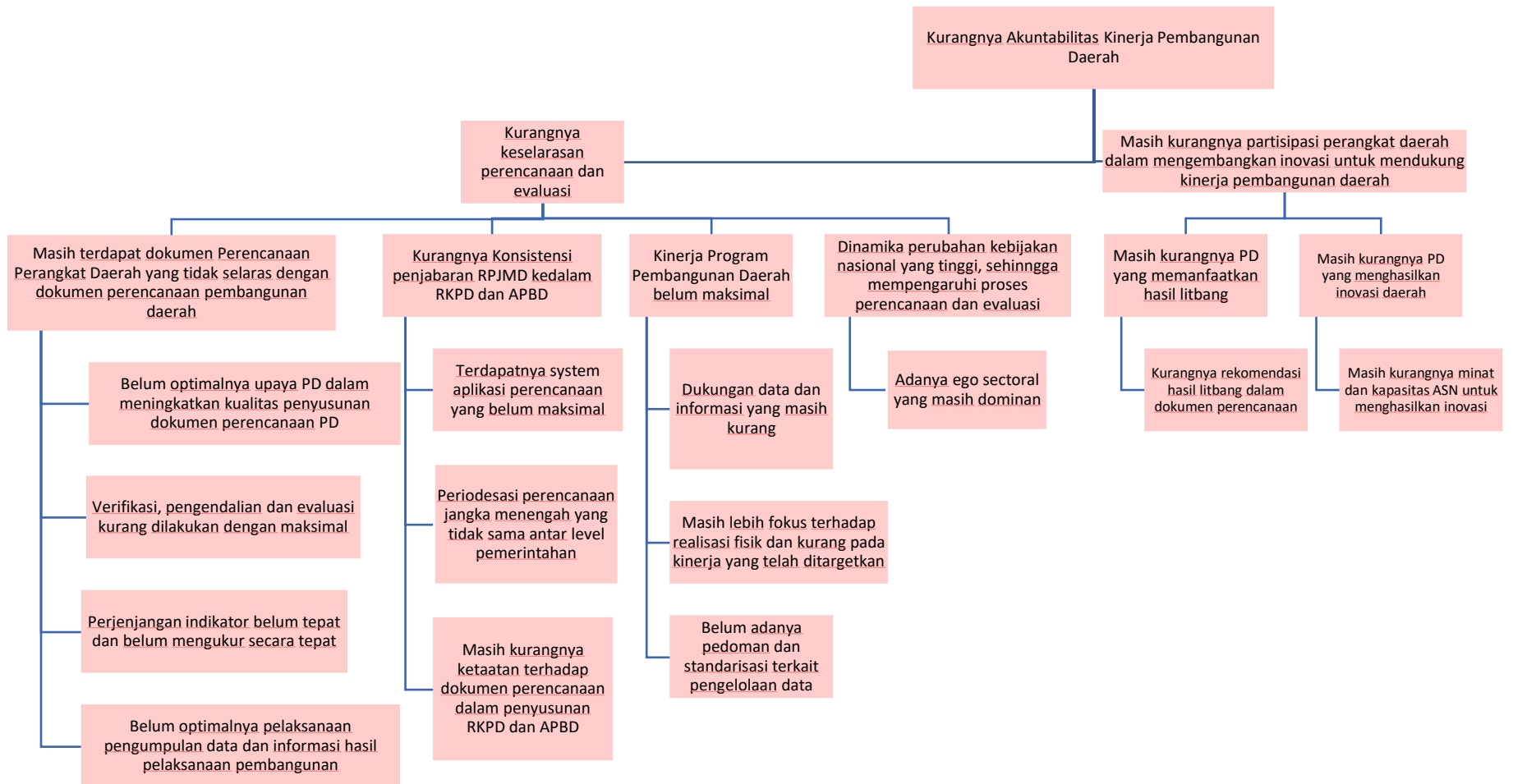
1. Permasalahan dari Urusan/ Unsur Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu masih kurangnya akuntabilitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Permasalahan dari Urusan/ Unsur Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, yaitu pemanfaatan hasil-hasil penelitian belum dilakukan dengan optimal dalam rangka mendukung perumusan kebijakan dan masukan dalam perencanaan pembangunan.

Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Gambar 3.1 Diagram Pohon Masalah



3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan harus selaras dengan Renstra Kementerian/ Lembaga atau Instansi yang terkait dengan tugas dan fungsinya, dengan demikian Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Strategis perlu memperhatikan arah pembangunan nasional demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Adapun **Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024** merupakan salah satu acuan Bappelitbangda dalam menyusun Renstra, dimana berdasarkan tugas dan fungsinya Bappenas berperan sebagai aktor utama dalam menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
	2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	1. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L 2. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan tata Kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas 2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Dengan melihat fungsi pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran Kementerian PPN/ Bappenas yang pertama (Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional) dan kedua (Terwujudnya efektifitas pengendalian dan pembangunan nasional).

Pada sasaran **terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional** dengan ukuran keberhasilan yang digunakan adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu **sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah**. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan melihat dari aspek Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah, dengan definisi Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta keselarsan KEM Daerah dengan KEM Nasional.

Yang dapat diukur dengan melihat :



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

- Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP Proyek prioritas dalam RKP
- Persentase jumlah provinsi yang kerangka ekonomi makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional.

Selain itu pada sasaran, **terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional** dengan indikator sasaran yaitu kinerja pengendalian pembangunan nasional, dimana salah satu aspek yaitu kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah. Dengan definisi yaitu untuk **memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional**. Hal tersebut dapat diukur dengan melihat :

- Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah.
- Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP.

Dengan demikian sinergitas tersebut tercemin dari keterpaduan dukungan daerah yang mendukung nasional, dimana perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran prioritas nasional.

Adapun jika dikaitkan antara Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dapat digambarkan dalam tabel berikut dengan melihat factor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Dinamika perubahan kebijakan nasional yang tinggi, sehingga mempengaruhi proses perencanaan	Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan kementerian terkait untuk memudahkan koordinasi
2.	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan belum menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah	1. Evaluasi Pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal oleh seluruh elemen Pemda 2. Belum optimalnya pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pelaksanaan	Komitmen pimpinan dalam manajemen kinerja

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			pembangunan	
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan nasional belum tentu sesuai dengan kondisi daerah	Masih kurangnya data dan informasi dalam menyusun perencanaan	Komitmen pimpinan yang tinggi
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional didukung oleh kapabilitas SDM	Berbagai system data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan belum terintegrasi	Belum optimalnya pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan	Kebijakan satu data yang bersamaan dengan transformasi digital

3.2.2 Telaahan Renstra Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sasaran yang ingin dicapai, sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hal tersebut digunakan untuk mengukur kinerja perencanaan pembangunan dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang sesuai antara target dan

realisasi di Kabupaten/Kota. Untuk meningkatnya hasil kelitbang yang berkualitas dapat dilihat dari persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pembangunan, sedangkan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilihat melalui nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan beserta factor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, sebagaimana yang tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pinrang				
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat Provinsi dan Kab/Kota	a. Data mikro penunjang perencanaan yang berbasis Kawasan (desa, kecamatan) b. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi dasar perencanaan pembangunan	a. Terciptanya komitmen antara Pemprov dan Kabupaten/Kota b. Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi c. Adanya diklat untuk meningkatkan

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			daerah c. Belum optimalnya kompetensi SDM Perencana d. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah	kapasitas SDM d. Adanya forum koordinasi Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja system birokrasi	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	a. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah b. Periode perencanaan baik di dari tingkat nasional sampai kabupaten kabupaten yang berbeda dan sering berubah-ubah c. Kapasitas SDM perencana pada OPD mitra	a. Adanya forum koordinasi Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) b. Adanya diklat-diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			masih kurang	
3.	Meningkatnya hasil kelitbangdan yang berkualitas	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	a. Kesempatan untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan masih terbatas	a. Telah adanya ruang untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan
2. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru				
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat Provinsi dan Kab/Kota	a. Data mikro penunjang perencanaan yang berbasiskan Kawasan (desa, kecamatan) masih terbatas b. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah c. Belum optimalnya	a. Terciptanya komitmen antara Pemprov dan Kabupaten/Kota b. Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi c. Adanya diklat diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM d. Adanya forum

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			kompetensi SDM Perencana d. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah	koordinasi Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2.	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP Bappelitbangda	Perjembangan indikator belum tepat dan belum mengukur secara tepat	a. Belum optimalnya kompetensi SDM Perencana	a. Adanya diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM
3. Renstra Bappeda Kabupaten Jenepono				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	a. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah b. Periode perencanaan baik di tingkat kabupaten kabupaten yang berbeda dan	a. Adanya forum koordinasi Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) b. Adanya diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			sering berubah-ubah c. Kapasitas SDM perencana pada OPD mitra masih kurang	
2.	Meningkatnya partisipasi pelibatan berbagai sector dalam perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat Provinsi dan Kab/Kota	a. Kapasitas dan kompetensi SDM Perencana masih kurang	a. Adanya diklat-diklat substansi untuk meningkatkan kapasitas SDM
3.	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang sosial ekonomi dan bidang infrastruktur pengembangan wilayah	Belum optimalnya pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan	Masih lebih fokus terhadap realisasi fisik dan kurang pada kinerja yang telah ditargetkan	Adanya forum koordinasi
4.	Mengembangkan dukungan kelitbang dan inovasi daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang dan inovasi dalam pembangunan	a. Masih terbatasnya kesempatan untuk	a. Adanya kompetensi inovasi pelayanan



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No.	Sasaran	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	sebagai rekomendasi dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah		memanfaatkan hasil inovasi b. Kesempatan untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan masih terbatas	publik dan stakeholders di tingkat nasional dan daerah b. Telah adanya ruang untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG RTRW

3.3.1. Telaahn Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi diarahkan untuk mengacu pada **Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041**, maka Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana fungsi urusan perencanaan pembangunan mempunyai peran dalam mensinkronkan serta mengharmonisasikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen rencana tata ruang dan wilayah tersebut. Sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dilakukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta pembangunan yang tidak berbasis tipologi dan karakteristik wilayah peruntukan, agar tidak merugikan masyarakat.

Perencanaan pembangunan diharapkan untuk dilakukan pada wilayah atau Kawasan yang menurut hasil perencanaan tata ruang wilayah menjadi prioritas dikarenakan mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap kepentingan



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

ekonomi, sosial budaya, dan atau lingkungan. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai kunci utama dalam menjaga sinergitas antara perencanaan pembangunan dengan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041, memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan Kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat. Pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dituangkan dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam jangka waktu 20 tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041, yang berisikan bahwasanya tujuan penataan ruang wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk mewujudkan Ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian local menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi :

- a. Kebijakan untuk mewujudkan ruang provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi :
 - Pengembangan Kawasan perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
 - Pengembangan dan penguatan system produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi local dan kelestarian lingkungan;
 - Pengembangan Kawasan perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan ruang provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar wilayah.
- b. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar wilayah yang meliputi :
 - Pengembangan system jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar wilayah dan antar Kawasan
 - Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan prasarana lainnya.

- c. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, meliputi :
- Pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung
 - Pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung
 - Pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi
 - Mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya, meliputi :
- Perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

3.3.2 Telaahan Pembangunan Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer yang memberi efek rumah kaca terdiri dari karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O). Adapun Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Aksi GRK berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca digunakan sebagai dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK sesuai dengan target pembangunan daerah, yang dapat digunakan untuk jangka waktu perencanaan sampai dengan tahun 2030.

Adapun berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020, kegiatan RAD-GRK meliputi bidang :

1. Pertanian, peternakan dan perkebunan
2. Kehutanan
3. Energi dan transportasi
4. Pengelolaan limbah



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

5. Kelautan dan perikanan
6. Kegiatan pendukung lainnya.
Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu :
 - a. Sumber dan potensi penurunan emisi GRK, merupakan identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber dan serapa emisi GRK berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral;
 - b. Baseline BaU (Business as Usual) emisi GRK, merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu tahun 2010-2030.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Dengan demikian, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dilaksanakan, dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan jangka waktu periode 2024-2026 diantaranya adalah sebagai berikut :

- Mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Meningkatkan keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan
- Mendorong peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja pembangunan daerah.



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian penting dalam strategi Bappelitbangda dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga harus disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, maka Bappelitbangda menyusun rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berkesinambungan yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sebagai pengejawantahan Sasaran. Dengan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke -		
					2024	2025	2026
<i>Tujuan RPD : Mengoptimalkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel</i>							
<i>Sasaran RPD : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah</i>							
<i>Indikator Sasaran RPD : Nilai SAKIP Provinsi</i>							
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	A	A	A
		Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai Indeks	70	71	72
			Rata-rata capaian indikator kinerja program	%	95,5	96	96,25
<i>Sasaran RPD : Optimalnya kualitas Pelayanan Publik</i>							
<i>Indikator Sasaran RPD : Indeks Layanan Publik</i>							
		Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovasi	Inovasi	Inovasi



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke -		
					2024	2025	2026
		mendukung kinerja Pembangunan Daerah					



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

4.2. CASCADING KINERJA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Cascading kinerja Bappelitbangda disusun dengan menerjemahkan pohon kinerja yang telah disusun dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Adapun *cascading* kinerja Bappelitbangda tertuang dalam Gambar 4.1 sebagai berikut.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Analisis Lingkungan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bagaimana suatu organisasi Perangkat Daerah menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut dan pemeritahan pada umumnya. Mengumpulkan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan bermanfaat agar dapat menentukan langkah strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dengan tepat dan efisien. Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat disusun formula strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti diagram formulasi SWOT berikut :

Faktor Eksternal	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tinggi; b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah; c. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang; d. Terdapat Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dilaksanakan Lembaga eksternal. 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah; b. Perubahan peraturan/kebijakan yang sangat dinamis sehingga menghambat proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; c. System informasi yang digunakan dalam semua proses siklus pembangunan belum terintegrasi secara optimal; d. Kualitas para perencanan di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih beum memadai (penempatan Kasubag Program di PD belum sepenuhnya memahami Peraturan terkait Perencanaan).
Faktor Internal	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan terutama dalam kemampuan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi (Sb,Se,Sf – Oc,Od); 2. Meningkatkan inisiatif SDM untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan (Sa,Sc,Sd-Oa); 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi SDM untuk mempelajari perubahan peraturan/ kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan (Sa,Sd-Tb) 2. Mengoptimalkan pemberdayaan dan kualitas SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi system perencanaan pembangunan (Sa,Sb,Sd,Se-Te) 3. Peran forum-forum yang melibatkan pemangku kepentingan Pentahelix lebih ditingkatkan agar sinergi perencanaan pembangunan dapat meningkat (Se- Tb).
<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas SDM (laki-laki dan perempuan) Bappelitbangda sudah memadai; b. Sarana/ prasarana kerja cukup memadai; c. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan; d. Motivasi bekerja yang kuat; e. Penyederhanaan reformasi birokrasi berbasis pada fungsional dan kinerja yang mengutamakan hasil dan keahlian f. Sumber pembiayaan yang cukup untuk 		

melaksanakan tugas.		
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat system baku yang mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan; System pengelolaan data dan informasi pembangunan yang mendukung perencanaan belum optimal; Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dalam proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal; Belum optimalnya implementasi SOP dalam peningkatan kinerja. 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sebagai SOP dalam peningkatan kinerja untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan guna perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta mampu mengkomodir perubahan kebijakan (Wa,Wb,Wd,We - Oc) Komitmen pimpinan dimanfaatkan untuk hasil penelitian dan pengembangan dalam prses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan (Wd-Oa) 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Integrasi system perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah (Wa- Tc) Pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan agar dapat mengatasi perubahan kebijakan, pengelolaan data dan informasi pembangunan (Wb - Tb); Melakukan review SOP yang menunjang tupoksi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar dijadikan sebagai instrument pendukung dalam SOP yang dirubah(Wa - Wc,Ed)

5.2 Penerapan Strategi

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappalitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan analisis yang memperhatikan kondisi lingkungan strategis agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun strategi dan kebijakan Bappalitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan dalam tabel T.C 26 sebagai berikut:

Table T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan terutama dalam kemampuan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pelaksanaan tugas Melakukan review SOP yang 	1. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai macam pelatihan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan kinerja SDM yang sesuai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>3. Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja pembangunan daerah</p>	<p>menunjang tupoksi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar dijadikan sebagai instrument pendukung dalam SOP yang dirubah</p> <p>3) Meningkatkan inisiatif SDM untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan</p> <p>4) Optimalisasi SDM untuk mempelajari perubahan peraturan/ kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</p> <p>5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sebagai SOP dalam peningkatan kinerja untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan guna perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta mampu mengakomodir perubahan kebijakan</p> <p>6) Peran forum-forum</p>	<p>dengan tugas dan fungsi organisasi;</p> <p>2. Merubah SOP sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi dan menjalankannya agar kinerja dapat meningkat;</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman para perencanan tentang perumusan perencanaan, kinerja dan anggaran berbasis kinerja perangkat daerah dan provinsi;</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota agar perencanaan seluruh level bisa selaras;</p> <p>5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan dan memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>6. Pemanfaatan teknologi lebih ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta ketersediaan data dan informasi</p>



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>yang melibatkan pemangku kepentingan Pentahelix lebih ditingkatkan agar sinergi perencanaan kinerja pembangunan dapat meningkat;</p> <p>7) Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>8) Pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan agar dapat mengatasi perubahan kebijakan, pengelolaan data dan informasi pembangunan</p> <p>9) Komitmen pimpinan dimanfaatkan untuk hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan</p>	<p>pembangunan, serta manajemen internal organisasi, dan ketersediaan informasi untuk publik melalui website dan media sosial.</p> <p>7. Membangun link anatar sistem informasi dan perencanaan pembangunan yang ada di internal Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan yang diluar Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>8. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan terpelihara secara berkelanjutan.</p> <p>9. Pemanfaatan forum-forum pentahelix dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah;</p> <p>10. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta control terhadap capaian indikator pembangunan;</p> <p>11. Meningkatkan</p>



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna peningkatan kualitas perencanaan dan kelitbangan.</p> <p>12. Fasilitasi antara aktivitas perencanaan dan kelitbangan ditingkatkan agar dapat mendukung proses perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan daerah.</p>



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun program yang digunakan pada Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2024-2026 sebanyak 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan rincian indikator :
 - **Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah (PD)** (narasi indikator cukup jelas)
 - **Nilai rata-rata capaian indikator program PD** (rata-rata capaian program / jumlah program x 100%)
 - **Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti** (jumlah temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti/jumlah temuan LHP x 100%)
2. Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan rincian indikator :
 - **% Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD** (Jumlah Program pada tahun n di RKPD/jumlah program yang seharusnya pada tahun n yang tercantum di RPJMD/RPD X 100%)
 - **% Konsistensi Program RKPD terhadap APBD** (Jumlah Program pada tahun n di APBD/jumlah program yang seharusnya pada tahun n yang tercantum di APBD X 100%)
 - **Rata-Rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah** (jumlah program yang mencapai target/jumlah program x 100%)
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rincian indikator :
 - **Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N** (jumlah indikator yang sesuai dengan indikator rkp/jumlah indikator RKP) + (jumlah target yang sesuai dengan target rkp/jumlah target rkp) / 2 x 100%

- **Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM** (target pada renja lingkup bidang PPM /target RKPD lingkup bidang PPM x 100%)
 - **Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indikator dan target pembangunan nasional lingkup bidang ekonomi dan SDA Tahun N** (jumlah indikator yang sesuai dengan indikator rkp/jumlah indikator RKP) + (jumlah target yang sesuai dengan target rkp/jumlah target rkp) / 2 x 100%
 - **Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA** (target pada renja lingkup bidang ekonomi dan SDA /target RKPD lingkup bidang ekonomi dan SDA x 100%)
 - **Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indikator dan target pembangunan nasional lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N** (jumlah indikator yang sesuai dengan indikator rkp/jumlah indikator RKP) + (jumlah target yang sesuai dengan target rkp/jumlah target rkp) / 2 x 100%
 - **Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan** (target pada renja lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan /target RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan x 100%)
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan rincian indikator :
- **Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah** (jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan/ jumlah hasil litbang x 100%);
 - **Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan teknologi** (Jumlah perangkat daerah yang menghasilkan inovasi dan teknologi/ jumlah perangkat daerah jumlah perangkat daerah x 100%).

Rincian terkait program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan dapat dilihat pada table TC. 2.7 sebagai berikut:

TABEL T.C 2.7
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pembangunan Daerah																			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat daerah	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	97 Nilai	97 Nilai	44,217,559,628.00	98 Nilai	46,245,956,833.00	99 Nilai	46,955,855,656.00	99 Nilai	137,419,372,117.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 Nilai	100 Nilai		100 Nilai		100 Nilai										
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %		100 %										
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	43 Laporan / Dokumen	14 Laporan / Dokumen	697,317,661.00	14 Laporan / Dokumen	915,866,048.00	15 Laporan / Dokumen	1,057,801,529.00	43 Laporan / Dokumen	2,670,985,238.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2 Dokumen	124,080,087.00	2 Dokumen	213,596,216.00	3 Dokumen	244,241,377.00	7 Dokumen	581,917,680.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	4 Dokumen	190,848,887.00	4 Dokumen	230,365,016.00	4 Dokumen	311,010,177.00	12 Dokumen	732,224,080.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	8 Laporan	382,388,687.00	8 Laporan	471,904,816.00	8 Laporan	502,549,975.00	24 Laporan	1,356,843,478.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	28 Laporan / Dokumen	28 Laporan / Dokumen	31,533,228,436.00	28 Laporan / Dokumen	32,002,754,674.00	28 Laporan / Dokumen	31,157,814,796.00	84 Laporan / Dokumen	94,693,797,906.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/ Bulan	190 Orang/ Bulan	30,728,962,176.00	200 Orang/ Bulan	31,054,548,356.00	200 Orang/ Bulan	30,122,814,796.00	200 Orang/ Bulan	91,906,325,328.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	309,094,330.00	12 Dokumen	329,000,000.00	12 Dokumen	369,000,000.00	36 Dokumen	1,007,094,330.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	220,171,930.00	2 Laporan	289,206,318.00	2 Laporan	300,000,000.00	6 Laporan	809,378,248.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	125,000,000.00	2 Dokumen	150,000,000.00	6 Dokumen	375,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	175,000,000.00	12 Laporan	205,000,000.00	12 Laporan	216,000,000.00	36 Laporan	596,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	11 Laporan / Dokumen	11 Laporan / Dokumen	250,000,000.00	11 Laporan / Dokumen	318,836,111.00	11 Laporan / Dokumen	384,000,000.00	33 Laporan / Dokumen	952,836,111.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	78,836,111.00	2 Dokumen	100,000,000.00	6 Dokumen	228,836,111.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN					
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100,000,000.00	6 Laporan	120,000,000.00	6 Laporan	144,000,000.00	18 Laporan	364,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100,000,000.00	3 Laporan	120,000,000.00	3 Laporan	140,000,000.00	9 Laporan	360,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang terlayani administrasi	184 Orang	190 Orang	550,000,000.00	196 Orang	635,000,000.00	202 Orang	760,000,000.00	202 Orang	1,945,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	184 Paket	190 Paket	170,000,000.00	196 Paket	190,000,000.00	202 Paket	250,000,000.00	202 Paket	610,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	184 Dokumen	190 Dokumen	130,000,000.00	196 Dokumen	150,000,000.00	202 Dokumen	170,000,000.00	202 Dokumen	450,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	184 Orang	190 Orang	100,000,000.00	196 Orang	125,000,000.00	202 Orang	150,000,000.00	202 Orang	375,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.05.0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	184 Orang	190 Orang	150,000,000.00	196 Orang	170,000,000.00	202 Orang	190,000,000.00	588 Orang	510,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	27 Laporan / Dokumen	132 Laporan / Dokumen	2,243,713,973.00	142 Laporan / Dokumen	2,560,000,000.00	152 Laporan / Dokumen	2,990,000,000.00	426 Laporan / Dokumen	7,793,713,973.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	150,000,000.00	12 Paket	170,000,000.00	12 Paket	190,000,000.00	36 Paket	510,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	550,000,000.00	12 Paket	650,000,000.00	12 Paket	800,000,000.00	36 Paket	2,000,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	100,000,000.00	12 Paket	120,000,000.00	12 Paket	140,000,000.00	36 Paket	360,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	180,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	12 Laporan	220,000,000.00	36 Laporan	600,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60 Laporan	1,163,713,973.00	70 Laporan	1,300,000,000.00	80 Laporan	1,500,000,000.00	210 Laporan	3,963,713,973.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.06.0000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000.00	12 Dokumen	120,000,000.00	12 Dokumen	140,000,000.00	36 Dokumen	360,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit	4 Unit	1,100,000,000.00	4 Unit	1,310,000,000.00	4 Unit	1,520,000,000.00	12 Unit	3,930,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	100,000,000.00	2 Unit	110,000,000.00	2 Unit	120,000,000.00	6 Unit	330,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.07.0000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1,000,000,000.00	2 Unit	1,200,000,000.00	2 Unit	1,400,000,000.00	6 Unit	3,600,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	3,115,000,000.00	24 Laporan	3,216,000,000.00	24 Laporan	3,317,000,000.00	72 Laporan	9,648,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115,000,000.00	12 Laporan	116,000,000.00	12 Laporan	117,000,000.00	36 Laporan	348,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,000,000,000.00	12 Laporan	3,100,000,000.00	12 Laporan	3,200,000,000.00	36 Laporan	9,300,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	54 Unit	68 Unit	4,728,299,558.00	68 Unit	5,287,500,000.00	68 Unit	5,769,239,331.00	68 Unit	15,785,038,889.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	41 Unit	750,000,000.00	41 Unit	800,000,000.00	41 Unit	850,000,000.00	41 Unit	2,400,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	8 Unit	12 Unit	350,000,000.00	12 Unit	400,000,000.00	12 Unit	450,000,000.00	12 Unit	1,200,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	150,000,000.00	3 Unit	187,500,000.00	3 Unit	234,375,000.00	3 Unit	571,875,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	2,628,299,558.00	2 Unit	3,000,000,000.00	2 Unit	3,234,864,331.00	2 Unit	8,863,163,889.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	850,000,000.00	10 Unit	900,000,000.00	10 Unit	1,000,000,000.00	10 Unit	2,750,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	97 % 100 % 90,03 %	100 % 100 % 91 %	5,375,311,800.00	100 % 100 % 92 %	5,962,408,574.00	100 % 100 % 93 %	5,996,279,540.00	100 % 100 % 93 %	17,333,999,914.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Evaluasi Pembangunan daerah dengan Dokumen Perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	3,075,311,800.00	100 %	3,467,408,574.00	100 %	3,491,279,540.00	100 %	10,033,999,914.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	350,000,000.00	1 Dokumen	350,000,000.00	3 Dokumen	1,000,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	2,775,311,800.00	3 Dokumen	3,117,408,574.00	2 Dokumen	3,141,279,540.00	8 Dokumen	9,033,999,914.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100 %	100 %	450,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	1,650,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	250,000,000.00	2 Dokumen	250,000,000.00	6 Dokumen	700,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	200 Orang	150,000,000.00	200 Orang	200,000,000.00	200 Orang	200,000,000.00	600 Orang	550,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	100 Buku	100,000,000.00	100 Buku	150,000,000.00	100 Buku	150,000,000.00	300 Buku	400,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	1,750,000,000.00	100 %	1,775,000,000.00	100 %	1,775,000,000.00	100 %	5,300,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	250,000,000.00	1 Laporan	275,000,000.00	1 Laporan	275,000,000.00	4 Laporan	800,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	8 Laporan	900,000,000.00	8 Laporan	900,000,000.00	8 Laporan	900,000,000.00	24 Laporan	2,700,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	48 Dokumen	72 Dokumen	600,000,000.00	72 Dokumen	600,000,000.00	48 Dokumen	600,000,000.00	48 Dokumen	1,800,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase data yang dikelola dalam sistem informasi pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan daerah	100 %	100 %	100,000,000.00	100 %	120,000,000.00	100 %	130,000,000.00	100 %	350,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000.00	3 Dokumen	120,000,000.00	3 Dokumen	130,000,000.00	9 Dokumen	350,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
	Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N	100,00 %	100,00 %	5,897,141,400.00	100,00 %	7,508,431,721.00	100,00 %	8,210,044,622.00	100,00 %	21,615,617,743.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Kesesuaian indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Kesesuaian indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan yang ditindaklanjuti PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	100,00 %	1,965,713,800.00	100,00 %	2,502,810,574.00	100,00 %	2,736,681,540.00	100,00 %	7,205,205,914.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	196,571,000.00	1 Dokumen	250,281,000.00	1 Dokumen	273,668,000.00	3 Dokumen	720,520,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	196,571,000.00	2 Laporan	250,281,000.00	2 Laporan	273,668,000.00	6 Laporan	720,520,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	334,171,000.00	1 Laporan	425,477,000.00	1 Laporan	465,235,000.00	3 Laporan	1,224,883,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	353,828,000.00	1 Dokumen	450,505,000.00	1 Dokumen	492,602,000.00	3 Dokumen	1,296,935,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	393,142,000.00	2 Laporan	500,561,970.00	2 Laporan	547,336,000.00	6 Laporan	1,441,039,970.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	491,430,800.00	1 Laporan	625,704,604.00	1 Laporan	684,172,540.00	3 Laporan	1,801,307,944.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100,00 %	100,00 %	1,965,713,800.00	100,00 %	2,502,810,573.00	100,00 %	2,736,681,542.00	100,00 %	7,205,205,915.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Perekonomian dan SDA	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	211,742,012.00	1 Dokumen	269,547,581.00	1 Dokumen	293,767,324.00	3 Dokumen	775,056,917.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	273,006,712.00	2 Laporan	347,537,544.00	2 Laporan	379,556,284.00	6 Laporan	1,000,100,540.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	433,379,040.00	1 Laporan	551,691,518.00	1 Laporan	604,125,655.00	3 Laporan	1,589,196,213.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	198,629,012.00	1 Dokumen	253,311,639.00	1 Dokumen	275,907,786.00	3 Dokumen	727,848,439.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	298,142,612.00	2 Laporan	379,535,545.00	2 Laporan	414,754,085.00	6 Laporan	1,092,432,242.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	550,814,412.00	1 Laporan	701,186,746.00	1 Laporan	768,570,406.00	3 Laporan	2,020,571,564.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,00 %	1,965,713,800.00	100,00 %	2,502,810,574.00	100,00 %	2,736,681,540.00	100,00 %	7,205,205,914.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	317,621,785.00	3 Dokumen	382,137,914.00	1 Dokumen	462,783,075.00	7 Dokumen	1,162,542,774.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	239,521,083.00	2 Laporan	304,037,212.00	2 Laporan	384,682,373.00	6 Laporan	928,240,668.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	349,025,783.00	2 Laporan	413,541,912.00	1 Laporan	494,187,073.00	4 Laporan	1,256,754,768.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	355,226,383.00	3 Dokumen	419,742,512.00	1 Dokumen	500,387,673.00	7 Dokumen	1,275,356,568.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	237,468,183.00	2 Laporan	401,984,312.00	2 Laporan	382,629,473.00	6 Laporan	1,022,081,968.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	466,850,583.00	2 Laporan	581,366,712.00	1 Laporan	512,011,873.00	4 Laporan	1,560,229,168.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja Pembangunan Daerah		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	-	30 %	5,509,149,450.00	40 %	6,483,342,998.00	50 %	7,051,084,930.00	50 %	19,043,577,378.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
				Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi	11,32 %	13 %		15 %		16 %		16 %			
		5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	3 Laporan	1,492,269,056.00	2 Laporan	1,604,620,056.00	3 Laporan	1,801,103,056.00	8 Laporan	4,897,992,168.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	1 Laporan	397,607,000.00	-	0.00	1 Laporan	577,282,000.00	2 Laporan	974,889,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	601,985,056.00	1 Laporan	735,909,000.00	1 Laporan	528,644,056.00	3 Laporan	1,866,538,112.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	492,677,000.00	1 Laporan	868,711,056.00	1 Laporan	695,177,000.00	3 Laporan	2,056,565,056.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	7 Dokumen	3 Dokumen	829,977,000.00	2 Dokumen	590,434,000.00	3 Dokumen	934,704,000.00	8 Dokumen	2,355,115,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	273,850,000.00	-	0.00	1 Dokumen	305,950,000.00	2 Dokumen	579,800,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5 Dokumen	1 Dokumen	282,277,000.00	1 Dokumen	295,217,000.00	1 Dokumen	314,377,000.00	3 Dokumen	891,871,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	273,850,000.00	1 Dokumen	295,217,000.00	1 Dokumen	314,377,000.00	3 Dokumen	883,444,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	8 Dokumen	5 Dokumen	1,835,963,880.00	7 Dokumen	2,353,474,880.00	7 Dokumen	2,231,220,880.00	19 Dokumen	6,420,659,640.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	282,277,000.00	-	0.00	1 Dokumen	314,377,000.00	2 Dokumen	596,654,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	2 Dokumen	883,009,880.00	2 Dokumen	693,547,000.00	2 Dokumen	711,262,880.00	6 Dokumen	2,287,819,760.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	2 Dokumen	396,827,000.00	2 Dokumen	774,276,880.00	2 Dokumen	576,827,000.00	6 Dokumen	1,747,930,880.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	1 Dokumen	273,850,000.00	1 Dokumen	295,217,000.00	1 Dokumen	314,377,000.00	3 Dokumen	883,444,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	-	0.00	1 Dokumen	295,217,000.00	-	0.00	1 Dokumen	295,217,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	314,377,000.00	1 Dokumen	314,377,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	0.00	1 Dokumen	295,217,000.00	-	0.00	1 Dokumen	295,217,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	14 OPD	14 OPD	1,350,939,514.00	14 OPD	1,934,814,062.00	14 OPD	2,084,056,994.00	42 OPD	5,369,810,570.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	659,449,900.00	1 Dokumen	740,816,900.00	1 Dokumen	619,976,900.00	3 Dokumen	2,020,243,700.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	81,800,000.00	1 Laporan	281,854,000.00	1 Laporan	320,054,000.00	3 Laporan	683,708,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1 Laporan	419,735,614.00	1 Laporan	321,581,176.00	1 Laporan	321,589,214.00	3 Laporan	1,062,906,004.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 Laporan	1 Laporan	94,400,000.00	1 Laporan	269,680,986.00	1 Laporan	246,955,880.00	3 Laporan	611,036,866.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
		5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	95,554,000.00	1 Laporan	320,881,000.00	1 Laporan	575,481,000.00	3 Laporan	991,916,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SULAWESI SELATAN
							60,999,162,278.00		66,200,140,126.00		68,213,264,748.00		195,412,567,152.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kontribusi setiap Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Adapun Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab pada bidang urusan penunjang pemerintahan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Peran strategis ini ditunjukkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama tiga tahun mendatang agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode RPD. Indikator Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Bappelitbangda untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama tiga tahun ke depan. Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun mendatang dapat dilihat pada **tabel T-C 28**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
Urusan Perencanaan						
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Belum dilakukan pengukuran	70	71	72	72
2.	Rata-rata capaian indikator kinerja program	95,25	95,5	96	96,25	96,25
Urusan Penelitian dan Pengembangan						

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Inovasi	Inovasi	Inovasi	Inovasi	Inovasi

Adapun rumusan untuk dapat menghitung indikator-indikator tersebut adalah sebagai mana tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran

Indikator	Rumusan
Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan yang diberikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas
Rata-rata capaian indikator kinerja program	$\frac{\text{Jmlh Indikator kinerja program yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator program}} \times 100\%$
Indeks Inovasi Daerah	Predikat Inovasi yang diberikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri

Target-target tersebut disusun untuk menunjukkan komitmen Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat daerah untuk mengawal target-target pembangunan Pemerintah Provinsi Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan meningkat setiap tahunnya.

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Optimalnya kualitas pelayanan publik

Adapun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2018, Bappelitbangda bertanggung jawab atas beberapa indikator, sebagaimana dalam table 7.2 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai Bidang Urusannya berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
Perencanaan							
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	97	100	100	100	100
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan							
8.	Persentase implementasi rencana	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
	kelitbangan						
9.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	94,44	95	95	95	95
10.	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	41,86	42	43	44	44



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 2023-2026 merupakan dokumen yang harus disusun oleh Bappelitbangda Sulawesi Selatan dalam merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah. Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam periode 3 tahun dari tahun 2024 hingga tahun 2026.

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Menyusun Renstra dengan memperhatikan :

1. Isu-isu strategis yang terkait urusan perencanaan, penelitian dan kelitbang;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome), keluaran (output) dari seluruh kegiatan dan sub kegiatan Renstra Bappelitbangda melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Bappelitbangda sampai dengan tahun 2022;
3. Kebijakan Nasional;
4. Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
5. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Renstra Bappelitbangda Tahun 2024 - 2026 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bappelitbangda sepanjang tahun tersebut. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bappelitbangda perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappelitbangda.